

BAB I

PENDAHULUAN :

FENOMENA KEBERTAHANAN KAMPUNG KUNINGAN

DALAM PERKEMBANGAN KOTA

Kota-kota negara sedang berkembang menghadapi paradoks perkembangan kota pada era transformasi global yaitu adanya percepatan pembangunan fisik dan ekonomi, serta pada sisi lain harus menghadapi peningkatan kesenjangan sosio spasial perkotaan yang tidak kunjung terpecahkan (Cohen, 1997; The United Nations Human Development Report, 1999; *Laporan Pembangunan Dunia*, 2009). Dalam perspektif perencanaan dan perancangan kota, salah satu penyebabnya adalah adanya perkembangan kota yang mengutamakan dinamika ruang terencana dan cenderung tidak mengintegrasikan potensi ruang yang tumbuh secara organik dalam jalinan pertumbuhan bersama (Soetomo, 2004). Namun demikian pada kondisi tersebut ada fenomena keberadaan kampung sebagai permukiman kota yang terbentuk secara organis masih dapat bertahan dalam perkembangan kota. Pengetahuan mengenai keberlanjutan ruang seperti ini sangat diperlukan dalam bahasan konsep integrasi ruang kota.

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Urbanisasi dan Problema Integrasi Ruang Kota

Sejak tahun 1980, di samping urbanisasi maka faktor globalisasi menjadi penentu perkembangan kota-kota Asia dewasa ini (Lim, 1990; Tjahyati, 2005). Adapun faktor globalisasi sebagaimana diketahui bukan hanya menyebabkan krisis ekonomi namun juga menyebabkan krisis perkembangan ruang kota (Goldblum & Tai-Chee Wong, 2000; Evers,

2002). Krisis keruangan ini bukan semata-mata merupakan disebabkan masalah ekonomi saja melainkan timbul dari kebijakan tata ruang yang dijalankan selama ini (Santoso, 2005). Hal ini terjadi karena globalisasi meningkatkan konflik dan disintegrasi pertumbuhan ruang kota terencana yang dikendalikan kepentingan pasar dengan ruang organis yang tumbuh tidak terencana. Hasilnya dapat dilihat dalam bentuk kesenjangan atau kontras fisik antara keberadaan gedung gedung pencakar langit dan permukiman kumuh di sekitarnya, pengusuran perkampungan untuk kepentingan ruang komersial dan perebutan lahan oleh pemilik modal maupun masalah-masalah sosial lain sebagai akibat pertumbuhan kota yang tidak terpadu dan saling mengisi. Bilamana masalah ini tidak dipecahkan dapat memicu degradasi, peningkatan kesenjangan sosio-spasial perkotaan degradasi serta memperbesar kemungkinan terbukanya konflik ruang maupun sosial yang mengancam masa depan kota (Cohen, 1997; *The United Nations Human Development Report*, 1999; Laporan Pembangunan Dunia, 2009). Dengan demikian dalam mewadahi serta mengarahkan urbanisasi sebagai proses adil dan manusiawi diperlukan proses dan produk kebijakan politik untuk mendukung integrasi ruang kota.

Dalam rangka mengembangkan keterpaduan pertumbuhan kota guna mengurangi dampak kesenjangan kota telah banyak program pemerintah maupun swasta telah dilakukan antara lain penataan lingkungan, sarana-prasarana dan perbaikan kampung, penyediaan perumahan bagi warga yang lahannya dibebaskan hingga program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk warga setempat. Sekalipun berbagai program karikatif tersebut memberikan banyak harapan namun tidak memberikan sumbangan ” menyediakan kota sebagai ruang dan kehidupan bersama seluruh warga ”. Langkah-langkah tersebut tidak efektif karena tidak meningkatkan keterpaduan perkembangan ruang kota sebagai sinergi dalam rangka mewujudkan kehidupan adil dan sejahtera warganya.

Hal ini menunjukkan bahwa integrasi dalam perencanaan dan perancangan kota tidak dapat dilihat hanya dari aspek fisik, fungsi dan visual saja melainkan menumbuhkan hubungan sosio-spasial kota (Ozkan, 1997; Cutberth, 2006).

1.1.2 Pemikiran Kebertahanan dalam Integrasi Ruang Kota

Perkembangan kota pada dasarnya merupakan akumulasi dari pengembangan kota yang bersifat organis yang terbentuk oleh kekuatan sejarah dan sosial budaya warganya terencana maupun pertumbuhan ruang terencana hasil kebijakan politik ruang kota (Kostoff, 1991). Dinamika yang terpadu saling mengisi bertumpu pada pemahaman dasar kota sebagai ” *human settlement* ” atau permukiman bukan hanya tempat tinggal namun juga ruang kerja yang berperan mendorong pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan warganya (Serageldin, 1997; Wirutomo, 2004). Hal ini sesuai dengan pemikiran mengenai prinsip pertumbuhan kota global berkelanjutan harus didasarkan pada penghargaan pada nilai-nilai lokal, prinsip-prinsip solidaritas dan keberdayaan komunitas (Serageldin 1995; Hall, 2000; Susser, Ida & Jane Schneider, 2003). Syarat utamanya adalah landasan perkembangan kota harus mempertahankan keragaman yang dilandasi prinsip keadilan dan penghargaan nilai-nilai budaya yang ada. Proses tersebut menuntut bahwa keberadaan ruang organis ini ini harus tumbuh bersama menjadi bagian perkembangan kota.

Apakah hal ini dapat diselesaikan melalui kebijakan perencanaan dan perancangan kota selama ini ? Landasan kebijakan tata ruang kota di Indonesia secara formal ideologis adalah menganut prinsip keadilan dan kesejahteraan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Dengan alasan menjamin pertumbuhan ekonomi, pada prakteknya tidak dapat dipungkiri yang terjadi hingga saat ini tata ruang dikendalikan pasar dan kepentingan

pemodal. Dalam banyak peristiwa, kepentingan masyarakat dikalahkan karena kepentingan ekonomi pemodal lebih diutamakan sehingga menumbuhkan berbagai konflik sebagai akibat pola pembangunan kapitalistik (Manuel Castells, 1977). Bertitik tolak dari pemahaman ini, konflik ruang kota harus dilihat dari kehendak manusia dalam memenuhi kebutuhannya bukan hanya menyesuaikan diri namun juga upaya menguasainya dan merubah sesuai dengan kepentingannya. Proses urbanisasi ini menghasilkan penataan ruang atas dasar mekanisme pasar yaitu ” proses saling mengalahkan dan merebut ruang untuk kepentingan sendiri. Perancangan kota yang hanya berorientasi pada penampilan fisik semata tidak akan memberi makna bagi peningkatan kesejahteraan berkeadilan bagi seluruh warga. Dengan demikian bisa dimengerti bilamana berbagai program yang dijalankan pemerintah seperti penyediaan perumahan, perbaikan lingkungan dan pemberdayaan warga tidak akan banyak membuahkan hasil bilamana strategi perencanaan dan perancangan kota tidak bertumpu pada pembentukan kesadaran dan komitmen warga kota. Pendekatan ini bisa dipahami dengan baik bilamana berpijak pada perspektif emansipatorik dan keadilan dengan memahami kota dari pengalaman dan pemaknaan warganya sehari-hari sebagai subyek perkembangan kota (Castells; dalam Evers, 2002).

1.1.3 Kebertahanan Kampung dalam Perkembangan Kota

Keberadaan kampung kota merupakan salah satu fenomena permukiman yang telah banyak dikaji dari bidang keilmuan seperti sosiologi, antropologi, planologi termasuk perencanaan dan perancangan kota. Fenomena kampung kota berbeda dengan konsep-konsep permukiman organis seperti *pavellas* atau *ghetto* di negara-negara sedang berkembang lain yang cenderung melekat dengan kemiskinan. Sampai saat ini keberadaan kampung menjadi bagian tidak terpisahkan dari sisi kehidupan kota di Indonesia. Kota

Jakarta sendiri dijuluki sebagai “ *The Big Village* “ karena komposisi kampungnya diperkirakan menempati 70 % ruang kota yang ada (Sujarto, 1992). Ada pula anggapan yang negatif mengenai fisik kampung namun keberadaannya dianggap sebagai *place* yang mewadahi kekuatan berbasis solidaritas dan harmoni permukiman yang dibangun oleh masyarakatnya (Sullivan, 1992 dalam Evers, 2002; Guinness, 1990). Perkembangan ruang serta kehidupan kampung telah memberikan inspirasi bagaimana pandangan tentang permukiman pada skala ketetanggaan yang dinamis dan akrab serta mampu menyesuaikan diri dalam proses urbanisasi (Khudori, 2002 ; Setiawan, 2000).

Sekalipun perkembangan kota modern telah mendesak keberadaan kampung namun tidak sepenuhnya mampu menghapuskan kehadirannya. Bahkan ada di antaranya secara ekstrim mampu bertahan di tengah-tengah gedung-gedung pencakar langit, perkantoran, pusat pusat perbelanjaan hingga hunian modern yang berfungsi sebagai apartemen atau kondominium (Dorleans, 2000; Evers, 2002). Sungguhpun demikian kemampuan kampung memiliki batas-batas yang tidak dapat dilampaui bila harus berhadapan dengan pembebasan lahan yang didukung kebijakan tata ruang. Bila demikian apa yang dapat dipelajari dalam aspek keruangan dari fenomena kebertahanan kampung baik yang terungkap (*manifest*) ataupun yang bersifat tersembunyi (*latency*) ? Diharapkan dari fenomena kebertahanan kampung dapat membawa pada berbagai pemikiran mengenai pengetahuan kekuatan ruang dan potensi integrasi ruang kota.

Studi ini menggunakan istilah kebertahanan untuk menjelaskan fenomena bertahan kampung. Kata tersebut dibedakan dengan istilah ketahanan yang dipakai dalam berbagai konsep seperti ketahanan nasional, ketahanan pangan, ketahanan militer dan sebagainya. Istilah kebertahanan sebagai suatu fenomena telah banyak dipakai sebagai ” dalam

berbagai pengkajian ilmiah¹. Kebertahanan berasal dari kata kerja ” bertahan ” dapat diartikan mengenai bertahan. Dalam buku Tolok Ukur Kondisi Ketahanan Nasional yang diterbitkan Lembaga Pertahanan Nasional pada tahun 1989, ketahanan nasional diartikan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan sebagai cerminan kemampuan bangsa dalam mengembangkan kekuatan nasionalnya. Ketahanan merupakan sesuatu yang telah diketahui ” kekuatan atau kemampuannya ” . Sedangkan ” kebertahanan” merupakan masih terbatas pada fenomena yang belum diketahui kekuatan atau kemampuannya.

1.2 Fenomena Kebertahanan Kampung Kuningan Di Kawasan Mega Kuningan

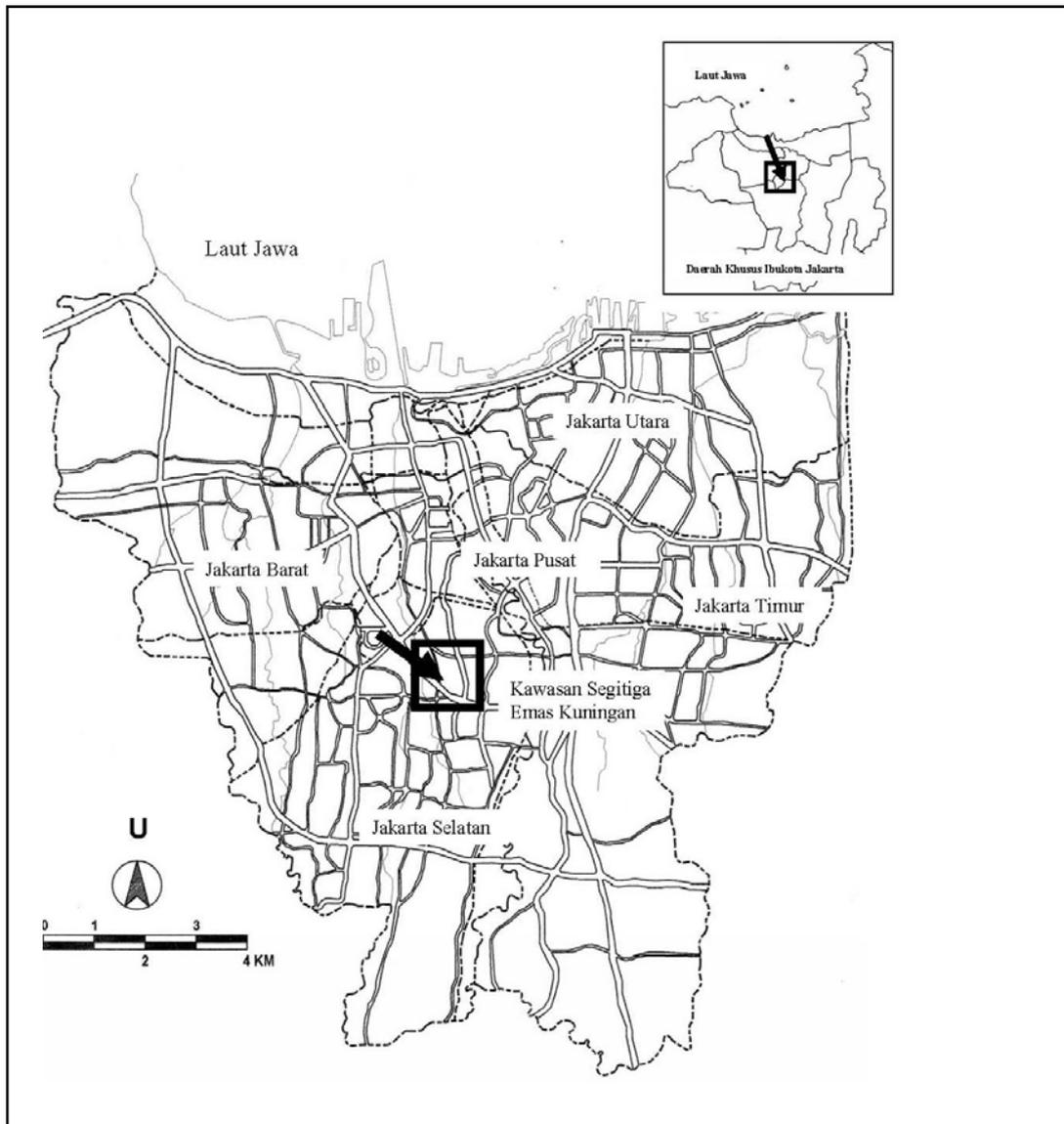
Pemilihan kampung Kuningan sebagai obyek studi didasarkan pada fenomena kebertahanannya dalam perkembangan kawasan Kuningan Jakarta yang menjadi salah satu kawasan kota yang paling modern dan mahal di Indonesia. Seperti halnya kawasan pusat-pusat kota lain di Jakarta, kawasan Kuningan ini mengalami perubahan baik secara fisik dan sosial sebagai hasil perkembangan *estate development* sejak tahun 1990. Hampir sebagian ruang-ruang kampung yang ada telah mengalami pengusuran untuk memberikan ruang bagi keberadaan kawasan modern.

Namun demikian kondisi yang ada menunjukkan adanya fenomena keragaman ruang kota dengan kehidupan kampung dan pada sisi lain keberadaan ruang kota berserta

¹ Penggunaan kata kebertahanan digunakan sebagai judul atau kata dalam tulisan ilmiah seperti : Luh Putu, Sendratari.tt. Perempuan saudagar di desa Candikuning, Tabanan, Bali: Suatu studi tentang strategi kebertahanan dalam usaha berdagang dan rumah tangga. Universitas Indonesia atau dalam abstrak tesis Widiarti, Lisa.2005. Analisis Karya Seni Lukis Modern Seniman Asal Sumatera Barat di Yogyakarta. Bandung : Institut Teknologi Bandung; atau abstrak tesis Sukaryanto.2004. Tradisi Otok-Otok: Studi Tentang Mechanism Of Survival Masyarakat Madura Di Surabaya. Surabaya : Universitas Airlangga.

kehidupan modernnya. Adapula aktivitas kampung yang menyangga kawasan modern atau keberadaan ruang-ruang kampung yang telah diakomodasi sebagai bagian kawasan modern yang menunjukkan potensi kampung tumbuh bersama. Bagaimana hubungan tersebut terbentuk dihubungkan keberadaan ruangnya ? Keberadaan kawasan Kuningan sebagai laboratorium hidup ” keragaman kota ” yang sangat berharga karena dibatasi waktu dan kondisi sehingga tidak tertutup kemungkinan beberapa tahun mendatang konstelasi keruangan ini akan berubah. Hal inilah yang mendorong penelitian mengenai keberlanjutan kampung Kuningan perlu dilakukan.

Banyak penelitian yang telah menyinggung perkembangan kawasan Kuningan sebagai bagian perkembangan kota Jakarta, namun demikian sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang mengambil lokus kampung Kuningan. Apakah memungkinkan sebuah kampung dengan dimensi luas yang terbatas dapat diangkat menjadi obyek penelitian dalam bahasan yang cukup luas mengenai perkembangan kota ? Ada beberapa penelitian yang telah diakui kredibilitasnya sekalipun hanya mengambil obyek kampung yang secara fisik terbatas sebagaimana dilakukan oleh Lea Jellinek (1995) yang kemudian diangkat menjadi tulisan ” Seperti Roda Berputar, Perubahan Sosial Sebuah Kampung ” di kampung Kebon Kacang Jakarta Pusat atau Patrick Guinness (1986) ” *Harmony and Hierarchy in a Javanese Kampung* ” di sebuah kampung di Yogyakarta. Dengan demikian tidak ada alasan kuat untuk menolak penelitian dengan obyek terbatas namun memiliki potensi kedalaman.



Gambar 1.01
Posisi Kampung Kuningan Di Jakarta
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2005-2007

1.3 Kajian Kritis Literatur

Ada beberapa pokok pemikiran berkaitan dengan bahasan perencanaan dan perancangan kota menyangkup topik bahasan yaitu integrasi ruang kota dan subyek yang disajikan obyek penelitian yaitu kampung. Kajian kritis literatur ini tidak dimaksudkan untuk menyusun kerangka teori penelitian namun dimaksudkan sebagai langkah menemukan gap teoritik serta kontribusi pengetahuan dalam teori arsitektur perkotaan.

1.3.1 Urbanisasi dan Problema Arsitektur Kota Di Indonesia

Menurut Norvick (2007), kata *urbanization* berarti " *to make urbanism* " memiliki makna proses sosial yang mengambil suatu tempat dalam ruang. Fenomena urbanisasi ini tidak bisa diartikan secara sempit sebagai mobilitas sosial penduduk kota, melainkan suatu proses menuju kehidupan kota yang digerakkan oleh perubahan ekonomi berkaitan dengan morfologi kota yang didorong faktor-faktor manusia, sumber daya dan teknologi (Knox dalam Soetomo, 2007). Urbanisasi tersebut berkaitan dengan pengertian *urbanism* sebagai proses pengkotaan baik secara fisik, mobilitas penduduk, perubahan sifat hingga kesadaran berorientasi ke kota (Wirth, 1938). Hal ini membawa pada pengertian bahwa persoalan urbanisasi tidak dapat dilepaskan dari peran perencanaan dan perancangan kota untuk mewujudkan ruang guna mewadahi aktivitas dan kehidupan kota.

Dalam arsitektur dipahami bahwa manusia memiliki hubungan yang erat dengan ruang sebagai tempat tinggalnya. Ruang bukan hanya menunjukkan " titik untuk menunjukkan koordinatnya sebagai lokasi " namun juga menjadi " wadah untuk beraktivitas (habitat); modal berinteraksi (*setting* lingkungan atau arena) serta membentuk maknanya dalam kehidupan ini. Analisis arsitektur sebagai ruang atau lingkungan binaan atau kemudian disempurnakan menjadi *place* pada konsep *human settlement* dapat

ditemukan dalam teori *ekistic* yang dikembangkan Constantine Doxiadis (1968). *Human settlement* dapat dibagi menjadi dua unsur utama yaitu : (1) Ruang yang berwujud wadah fisik (*the container*) yang menampung aktivitas yang terdiri dari ruang fisik binaan dan lingkungan alam. (2) Isi ruang (*the content*) yaitu manusia dan masyarakat berikut kehidupan sosial budayanya. Ke 2 unsur tersebut saling mempengaruhi namun aktor dasarnya adalah manusia sebagai *anthropocosmos*. Selanjutnya unsur tersebut dibagi menjadi 5 (lima) elemen, pertama ruang yang terbangun sebagai tempat bernaung (*shell*) dapat diartikan sebagai ruang pribadi yang memerlukan ruang komunikasi baik linear maupun nodal; kedua adalah network yaitu prasarana untuk menghubungkan ruang pribadi yang bisa disebut ruang bersama atau ruang publik; ketiga adalah lingkungan alami termasuk tanah, iklim, vegetasi dan sebagainya; keempat adalah manusia sebagai makhluk pribadi ; kelima adalah masyarakat sebagai kumpulan termasuk pola hubungan sosial budaya yang terjadi di antaranya. Implikasi penting dalam pemikiran Doxiadis ini adalah pemahaman manusia sebagai aktornya baik secara pribadi atau kolektif mempengaruhi proses pembentukan permukiman. Skala permukiman mulai dari yang terkecil yaitu ruang pribadi, rumah, lingkungan ketetanggaaan, kawasan, kota hingga skala yang lebih luas lagi. Dengan demikian pengetahuan permukiman tidak hanya bersifat teknis harus dihubungkan dengan berbagai disiplin ilmu lain seperti ekonomi, budaya, sosial maupun politik.

Berbeda dengan karakter arsitektur kota negara maju, kota-kota negara sedang berkembang lebih didominasi bentukan sosial masyarakat dan pertukaran komoditas daripada bentuk fisiknya (Nas, 1986; Reid, 2004). Sedangkan perkembangan kota lebih banyak didominasi pertumbuhan organis daripada perkembangan terencananya. Akibatnya kota-kota ini dipersepsikan bersifat dualistik yaitu menjadi pusat kemajuan maupun keterbelakangan sekaligus (Evers, 2002) atau bahkan majemuk dengan mengambil konsep

Furnivall untuk menggambarkan kompleksitas sosio-spasial kota. Tantangan yang harus diatasi adalah pengembangan hubungan sosial yang sinergi antar ruang kota yang terkait dengan masalah sosial seperti pemberdayaan warga jadi bukan semata-mata persoalan kesenjangan fisik belaka.

Mengapa keberadaan ruang organis menjadi penting dalam urbanisasi yang dipengaruhi globalisasi ? Pada era globalisasi, faktor-faktor sosial yang berperan dalam pembangunan kota adalah demokrasi, transparansi, partisipasi masyarakat dan desentralisasi. Ada harapan proses ini membentuk pola urbanisasi yang nilai-nilai global membawa paradigma baru konsep glokalisasi, *bottom up development*² yang dilandasi demokrasi, keterlibatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan (Mc-Gee, T.G and Ira M.Robinson. 1995; Mc-Gee; 2000). Proses pembangunan yang diharapkan adalah ” model *bottom up* ” atau pengembangan potensi lokal yang mampu bersinergi dengan kekuatan global. Dialektika ini diharapkan akan membangun kemandirian dan produktivitas warga kota, dengan demikian kekuatan ruang lokal yang tumbuh secara organis menjadi sumber daya menghadapi kekuatan global. Adapun konsep keruangan yang bersifat kewilayahan identik dengan prinsip-prinsip integrasi ruang kota. Keberlanjutan ruang-ruang ini tidak saja berlatar belakang sejarah perkembangan kota melainkan peran strategisnya dalam membentuk kehidupan warga.

Tantangan globalisasi yang harus dihadapi adalah dominasi perkembangan kapitalis yang mengancam keberadaan sektor non-kapitalis. Sekalipun kota memiliki dua makna yaitu sebagai ruang pertumbuhan ekonomi maupun tempat tinggal warga, namun paradigma kota sebagai mesin pertumbuhan menyebabkan kepentingan ekonomi lebih diutamakan dibandingkan kepentingan sosialnya. Maka dapat dipahami bila terjadi

² Konsep *top down* dianggap gagal merealisasikan pertumbuhan menjalar (*spread effect*) dan penetasan (*trickle down effect*) sebaliknya menghasilkan dampak pengurasan sumber daya (*back wash effect*) dan polarisasi.

benturan berbagai kutub antara lain pertumbuhan ruang terencana dan ruang organik atau pengusiran permukiman untuk dijadikan ruang komersial. Karakter ruang organik yang lekat dengan kehidupan sehari-hari dengan jaringan ketetanggaan yang merupakan sumber modal sosial kota sehingga pada saat krisis keberadaan ruang-ruang ini justru menjadi penyelamat kehidupan sebagian besar warga kota yang berpenghasilan rendah (Setiawan, 1999). Analisis proses perkembangan kota juga perlu memperhatikan potensi jaringan ruang kehidupan warga dan pengendalian ruang kota agar tidak didominasi sektor privat sehingga tetap memiliki makna sosial bagi peningkatan kesejahteraan warganya. Sebaliknya bagaimana memperkuat “ *power or spirit of place* “ (Hayden, 1995) dapat diperkuat mulai dari skala lingkungan ketetanggaan hingga kota (Mc Gee, 2001). Dengan demikian dalam studi perancangan kota diperlukan pemahaman proses urbanisasi maupun pembentukan “ *place*” harus dipahami dari cara-cara berlangsungnya produksi ruang kota.

1.3.2 Debat Teori Ekologi dan Neo-Marxis dalam Produksi Ruang Kota

Produk arsitektur kota baik respon terhadap perkembangan ruang terencana maupun cara memproduksi ruang terencana pada dasarnya adalah buah kebijakan lanjut perencanaan kota sebagai suatu keputusan politik tata ruang (Soetomo, 2004). Bagaimana masalah kondisi arsitektur kota tersebut dihubungkan sebagai proses produksi ruang kota baik dalam tingkat kebijakan dan praktek yang dilakukan ? Tidak ada keraguan sedikitpun bahwa berbagai masalah yang terjadi sekarang ini adalah landasan ideologis pengembangan kota yang cenderung untuk melepaskan perkembangan kota mengacu pada berlangsungnya mekanisme pasar (Santoso, 2006).

Ide dasar tersebut dapat dilacak dari pemikiran Chicago School yang menyatakan bahwa perkembangan kota mengikuti hukum ekologi sosial (Park, 1974). Dalam pemikiran

ekologi³ sosial tersebut, kota digambarkan ruang interaksi sebagai proses perkembangan yang mengikuti hukum ekologi kota terbentuk oleh suatu prinsip menyesuaikan diri dan menuju keseimbangan (Hawley, 1950; Burgess, 1974; Hubbard, 2006). Menurut teori tersebut kota digambarkan sebagai ruang interaksi antar berbagai kekuatan kelompok masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai tanah. Pandangan ekologi sosio spasial di atas mengacu pemahaman determinisme ekonomi pada mekanisme alamiah dalam perkembangan ruang kota. Menurut teori ini adanya invansi, suksesi dan segregasi ruang merupakan gejala alamiah karena mengarahkan pada terbentuknya keseimbangan kota. Setiap kelompok sosial membentuk ruangnya sesuai dengan ciri-ciri kelompoknya, tidak hanya menyesuaikan dengan lingkungan namun juga melakukan persaingan dan proses seleksi di antara mereka. Adanya benturan ” ruang terencana dan ruang tidak terencana atau organis ” yang berakhir pada suksesi dan segregasi ruang diterima sebagai kewajaran. Pada konteks inilah kota tumbuh dan berkembang melalui peningkatan harga tanah, penjualan, penggusuran atau pembebasan tanah. Teori Burgess dikembangkan oleh Hoyt menjadi teori sektor dan teori inti sel oleh Mc Kenzie. Konsep zoning atau pembagian kota dalam zone-zone fungsional yang ditentukan nilai tanah sebagaimana dilihat dalam perencanaan kota tidak terkecuali di Indonesia mengikuti prinsip ini.

Melalui pendekatan ini pertumbuhan kota dapat meningkatkan produktivitas ekonomi kota, proses perkembangan kota secara alami dan *trickle down effect* yang mengasumsikan bahwa perkembangan ruang-ruang terencana akan memberi manfaat bagi keberadaan ruang-ruang organis yang berada di sekitarnya. Namun pendekatan ini terbukti tidak mengarah pada integrasi sebaliknya menciptakan konflik kota akibat suksesi dan

³ Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk dengan lingkungannya, dalam ekologi sosial kota hal tersebut diterapkan pada manusia dengan kota sebagai lingkungannya. Pemikiran ekologi sosio spasial ini agar dibedakan dengan pendekatan ekologi atau pembangunan ekologis atau pembangunan berkelanjutan atau berwawasan lingkungan yang justru kita butuhkan saat ini dan mendatang (Soemarwoto, 1985; Frick, 2007).

segregasi ruang kota. Fakta dramatis kampung Kebon Kacang Jakarta tahun 1990 menunjukkan bahwa kelompok sosial yang lemah tinggal dalam ruang-ruang organis seperti kampung di pusat kota ini akan terdesak mengalami sukseksi (Jellinek, 1995). Fenomena pengembangan kawasan komersial yang digerakkan oleh *estate management* melalui mekanisme pasar di Indonesia menunjukkan bahwa konsep ini justru didukung kebijakan politik tata ruang. Tata ruang kota semacam ini bukan disusun dalam strategi integrasi atau sinergi namun telah menjadi arena seleksi dan pertarungan mempertahankan hidup. Artinya penerapan teori ini mengarah pada proses kompetitif sehingga justru menghasilkan konflik bukan suatu sinergi akibat perebutan ruang maupun benturan budaya dan kepentingan ekonomi. Namun bukan berarti teori ini tidak ada manfaatnya, kemampuan ruang berkompetisi dan hubungan antar ruang dalam ekologi kota bisa digunakan untuk menganalisis peran ruang yang ada.

Teori kedua yang menerangkan terbentuknya ruang kota dari hasil konflik berasal dari pandangan Neo-Marxis. Kondisi ekologi persaingan kota inilah yang dikritik dalam pemikiran Neo-Marxis bahwa kota menjadi arena eksploitasi atau ketidakadilan oleh kepentingan ekonomi kelas dominan (Harvey, 1973; Castells, 1977). Sekalipun Karl-Marx tidak pernah mengembangkan pemikiran mengenai ruang kota namun para pemikir yang mengadopsi pemikirannya seperti Harvey dan Castells yang dikenal sebagai Neo-Marxis menempatkan peran ruang kota untuk menjelaskan praktek-praktek eksploitasi dan konflik antar kelas. Kota sebagaimana digambarkan teori ekologi dalam pandangan Neo-Marxis adalah hasil sistem produksi kapitalisme. Kebijakan politik pemerintah mendukung dan menyerahkan kota kepada sektor privat (para pemilik modal) dalam konteks *estate management* identik mendasarkan pertimbangan kepentingan ekonomi yang menguntungkan sekelompok kecil warga. Pada sisi lain kepentingan kelompok warga yang

lebih besar semakin terdesak sementara pemerintah hanya bisa berharap partisipasi sektor privat untuk memikirkan kepentingan kelompok warga yang lebih besar seperti yang diharapkan dari *trickle down effect*.

Menurunnya peran serta warga dalam pengembangan ruang akan berakibat fenomena *The Lost Space* pada kota seperti dikemukakan Trancik (1985) karena kehilangan nilai kemanusiaannya. Rasa memiliki kota atau *sense of place* menjadi rendah sehingga kualitas arsitektur kota menurun yang berpotensi pada konflik kota. Benturan kepentingan terjadi ketika sistem kapitalisme akan membentuk ruang untuk mengatur kepentingannya (ruang terencana) sedangkan warga akan membentuk ruangnya sendiri (ruang tidak terencana), sehingga semakin tinggi perkembangan kota maka akan semakin meningkatkan konflik dan proses eksploitasi yang berlangsung. Namun permasalahannya tanpa campur tangan atau keterlibatan pemerintah dalam bentuk kebijakan politik sulit untuk mengubah sikap pragmatisme sektor privat yang mengharuskan partisipasi tersebut. Bertentangan dengan pemikiran liberal yang didasarkan pada ekologi persaingan maka integrasi menurut Neo-Marxis adalah hasil dari pengendalian sepenuhnya pemerintah.

Bagaimana kelebihan dan kelemahan dua teori tersebut dipandang dari berbagai perspektif ? Pertama, benarkah kota adalah arena konflik atau konsesus ? Kenyataan menunjukkan bahwa dalam kehidupan kota antara konsesus dan konflik adalah sesuatu yang alamiah pasti selalu terjadi. Konsesus sebagai embrio partisipasi hanya terjadi bila kedua belah pihak berdiri dalam kesejajaran atau tidak ada dominasi. Banyak pendekatan konsesus bersifat semu karena mengacu kepentingan pihak yang dominan. Sedangkan konflik tidak selalu berakhir pada kondisi buruk karena dapat berperan sebagai mekanisme pengendalian dan mengarahkan terjadinya konsesus. Baik konsesus maupun konflik diperlukan guna membangun hubungan partisipatif dalam pengembangan kota, analisis

ruang kota tanpa mempertimbangkan kedua faktor tersebut tidak banyak bermanfaat. Kedua, baik pandangan ekologi maupun Neo-Marxis tidak sepenuhnya dapat menjelaskan fenomena keberlanjutan kampung dan ekspansi perkembangan kota di Kuningan. Kedua teori ini dibangun situasi kota yang mengikuti hukum persaingan pasar karena kondisi yang berbeda dengan situasi perkembangan kota kapitalis di Indonesia. Hukum ekologi mengenai perkembangan kota yang terjadi melalui perubahan harga tanah sehingga menyebabkan suksesi tidak sepenuhnya terjadi di Kuningan. Keberlanjutan kampung bisa bermakna fungsional atau sebaliknya eksploitatif. Artinya perlu penjelasan teori tersendiri untuk menjelaskan fenomena kontekstual (baik lokasi maupun waktu) perkembangan kota seperti dilakukan Evers (1995), Mc Gee (1971; 1974) dan Soetomo (1988). Kedua teori sepakat adanya persaingan namun berbeda dalam hal menilai proses tersebut benar atau tidak. Dengan demikian tanpa pendekatan yang bersifat empati dan emansipatorik sangat mustahil integrasi pengembangan kota yang adil dapat dilakukan.

Ketiga, kedua teori sekalipun memberikan sumbangan pemikiran hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia dengan sistem sosial ekonomi yang dibangunnya namun cenderung mengabaikan faktor sosial budaya. Proses adaptasi (penyesuaian) dalam ekologi antropologi menjelaskan potensi faktor sosial budaya bukan hanya faktor ekonomi saja (Geertz, 1983; Columbijn, 2006). Dalam arsitektur, fenomena menunjukkan ada beberapa keberatan lain : (1) Kedua teori ini juga menekankan pada determinisme faktor ekonomi dan produksi pada pembentukan ruang sementara mengabaikan aspek sosial budaya masyarakat kota, (2) Perbedaan situasi, sejarah dan masalah yang menjadi dasar pembentukan teori tersebut, (3) Bagaimana peran ruang sebagai " place " yang mampu mempengaruhi perilaku manusia. Dengan demikian perlu penjelasan lebih lanjut mengenai keberlanjutan kampung ataupun membangun integrasi ruang kota. Maka alih-alih masalah

integrasi ruang kota dapat diwujudkan selama paradigma perencanaan dan perancangan kota masih berorientasi pada kepentingan ekonomi serta tidak memperhatikan potensi ruang lokal. Alhasil untuk memahami fenomena tersebut tidak ada jalan lain untuk melakukan penelitian mendalam terhadap keberadaan ruang sebagai bagian dari proses produksi sosial kota dan sebaliknya.

Bagaimana fenomena kebertahanan kampung bertahan dalam perkembangan kota yang berlangsung dengan cara-cara kapitalistik ? Pertanyaan ini diajukan didasarkan pandangan bahwa kebertahanan permukiman saja tidak cukup bermakna bila tidak memberikan peningkatan keadilan dan kesejahteraan bagi warganya. Fakta menunjukkan bahwa banyak kampung atau permukiman warga yang bertahan namun dalam situasi yang buruk sehingga kebertahanannya dianggap sementara. Kebertahanan kampung ini karena dibutuhkan oleh sistem produksi kapitalis tersebut. Bila demikian maka sesungguhnya proses ekspansi dan suksesi pada dasarnya merupakan suatu mekanisme pasar yang diperlukan agar sistem tersebut tetap tumbuh dan kompetitif. Iklim tersebut dapat memacu tumbuhnya peluang dan meningkatkan produktifitas kota. Penyebabnya bukan disebabkan ” pengaruh eksploitasi kapitalisme ” namun berasal dari budaya masyarakatnya sendiri atau ketidakmampuan pemerintah mengatur regulasi yang ada (De Soto, 2005). Sedangkan untuk menciptakan keadilan perlu dilakukan dengan pendekatan kekuasaan atau peran pemerintah. Keberatan pada teori antara lain adalah adanya fakta bahwa tidak semua hubungan kota bersifat konflik serta pendekatannya yang mengutamakan kekuasaan sebaliknya mengabaikan peran individu atau kelompok. Hubungan antara kampung dengan kawasan modern semata-mata hubungan eskploitatif. Tidak ada pemahaman mengenai hubungan kerjasama atau menghargai dalam ruang kota yang menjadi dasar hubungan yang saling membutuhkan dalam pendekatan konflik tersebut. Maka pandangan radikal

Neo-Marxis, pemecahan masalah kota adalah terletak pada perubahan cara produksi kapitalis menjadi produksi sosialis dan pengambilalihan kekuasaan oleh kelas pekerja tidak diperlukan. Kebertahanan kampung justru menunjukkan bahwa proses eksploitasi berlangsung baik dalam hubungan dengan kota maupun di lingkungan internal mereka sendiri (Soetomo, 1988). Konsekuensinya bila kampung tetap dilestarikan maka sebenarnya identik dengan melestarikan kondisi yang buruk dan ketergantungan terhadap kota atau menyetujui praktek-praktek berlangsungnya modus produksi kapitalis. Hal ini mendesak pemahaman lebih holistik dan mendalam mengenai fenomena kebertahanan tersebut dikaitkan dengan kepentingan kampung yang sebenarnya.

1.3.3 Teori Produksi Ruang Sosial Kota

Dalam bukunya *The Production of Space* (1991), Henry Levebvre seorang sosiolog beraliran Neo-Marxis menyatakan landasan konsepnya yaitu ruang merupakan produk sosial selanjutnya ruang melahirkan proses sosial (Levebrve, 1991). Ruang bukan kumpulan obyek fisik atau gagasan namun merupakan struktur sosial di mana orang menyatakan kekuasaan menempatkan dirinya serta mengatur orang lain. Analisis ruang tidak akan jelas tanpa memahami proses produksi ruang kota dan modus manusia sebagai pemakainya. Produksi ruang ini mengambil landasan pemikiran sosial yang kurang lebih serupa dengan istilah mengkonstruksi ruang. Ada 3 (tiga) kelompok ruang berdasar pembagian sistem produksi tersebut yaitu : (1) Ruang yang mewadahi aktivitas sehari-hari atau *Spatial Practise*, ruang ini dirasakan oleh pemakainya. Ruang ini lebih banyak bersifat fisik sebagai ruang yang benar-benar dialami. (2) Ruang yang diabstraksikan untuk memenuhi kepentingan produksi sehingga harus memenuhi pencitraan termasuk cara tinggal di dalamnya yang disebut *Representation of Space* atau representasi mengenai

konsepsi ruang yang ideal. Ruang semacam ini berada dalam gagasan atau dokumen perencanaan dan perancangan kota. (3) Ruang ketiga adalah ruang yang direpresentasikan untuk mawadahi kepentingan citra-citra atau simbol yang berada dalam kenyataan atau *Representational Spaces*. Dalam arsitektur representasi ruang ini adalah ruang yang sebenarnya karena tidak semata-mata dimanfaatkan secara fungsional namun terkandung di dalamnya berbagai pandangan dan gagasan mengenai hubungan yang sesungguhnya. Adanya kesadaran ruang yang direpresentasikan ini merupakan landasan untuk melakukan perubahan terhadap praktek meruang maupun representasi ruang. Kenyataannya pengurusan untuk pembangun kawasan yang terencana dan dilegitimasi oleh kebijakan tata ruang kota adalah dominasi oleh representasi ruang atas ruang yang dialami dengan ruang-ruang yang direpresentasikan. Tidak ada jalan lain, pengamatan mendalam dalam fenomena sehari-hari adalah dasar pendekatan kritis untuk menemukan makna ruang yang sesungguhnya.

1.3.4 Teori Integrasi Ruang Kota

Pemikiran mengenai integrasi ruang kota untuk mengatasi ” masalah ” dalam perencanaan dan perancangan kota sebenarnya bukan hal baru. Roger Trancik (1986) telah menggunakan konsep tersebut guna mengatasi masalah ”*Lost Space*” kota-kota di Amerika Serikat. Fenomena ” *Lost Space* ” ini disinyalir sebagai akibat perancangan kota menggunakan pendekatan *Modern Movement*. Pendekatan ini bersifat fungsional dan rasional yang menghasilkan ketidaknyamanan kota baik secara fisik dan visual kehilangan kualitas fisik, sosial, nilai-nilai manusiawi serta memorinya (Jacobs, 1969). Melalui studi terhadap kota-kota klasik, Trancik menunjukkan bahwa kekuatan budaya dan nilai nilai sejarah mampu menghidupkan kembali kota sebagai ruang yang humanistik. Ada 3 (tiga)

pilar teorinya yaitu *figure ground*, *linkage theory* dan *place theory*. Pertama, melalui *figure ground* ditemukan mengenai solid-void atau komposisi ruang terbuka dan tertutup. Suatu kota ditentukan kualitas ruang publiknya. Kedua, melalui *linkage theory*, dijelaskan bahwa suatu kota harus memiliki hubungan interaksi antar warganya. Ketiga, *place theory* yang menjelaskan bahwa dalam pemahamannya arsitektur ruang tidak hanya dipahami sebagai dimensi material fisik atau *space* yang terbentuk oleh dinding, lantai dan langit-langit yang dapat menampung aktivitas manusia. Ruang atau *space* akan menjadi *place* setelah diberi makna oleh manusia bukan sekedar untuk menampung aktivitas. Trancik mengintegrasikan 3 (tiga) aspek ruang tersebut untuk mengembalikan kota menjadi ” *place* ” bagi kehidupan warganya atau ruang kota yang manusiawi. Kemudian dipadukan dengan konsep visual Gordon Cullen (1961) dan *sense of places* Kevin Lynch (1969) sebagai *place* baik secara fisik, visual, fungsional maupun emosional yang menarik bagi warganya.

Namun perlu disadari bahwa problematika disintegrasi kota yang dihadapi Trancik berbeda dengan problematika kota di Indonesia. Pertama, masalah yang terjadi di Indonesia disebabkan urbanisasi yang menimbulkan peningkatan kesenjangan sosial dan fisik. Kedua, perbedaan struktur kota yang memiliki morfologi solid tersebut berbeda dengan struktur kota di Indonesia yang lebih pada sistem sosialnya seperti dijelaskan pada Bab. 1.3.1. Masalah yang kesenjangan sosio spasial tidak dapat dipecahkan pada *linkage* yang bersifat fisik atau visual saja melainkan membangun ruang produktif bersama bagi seluruh warganya. Ketiga, problematika *place* untuk kota di Indonesia tidak hanya berbeda pada potensi dan karakter lingkungan sosial budayanya namun permasalahannya yaitu kebutuhan ruang yang manusiawi dalam proses urbanisasi. Hal ini mendorong mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana hubungan *place* dalam proses urbanisasi ?

Dalam sosiologi, teori integrasi masyarakat ini juga perlu dipahami dari adanya konsesus dan konflik (Nasikun, 1988). Menurut perspektif struktural fungsional adanya integrasi tersebut oleh adanya konsesus pada nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Adanya konflik merupakan faktor eksternal bukan berasal dari dalam, dengan demikian integrasi hanya bertitik tolak pada konsesus. Berbeda dengan perspektif struktural konflik yang melihat konflik berasal dari dalam dan integrasi bisa dilakukan dengan cara pemaksaan baik secara legal maupun adanya ketergantungan pada faktor ekonomi. Keduanya menyatakan bahwa konsesus dan konflik selalu ada. Persoalannya sejauh mana peran ruang membentuk nilai-nilai bersama atau sebaliknya menyumbangkan konflik.

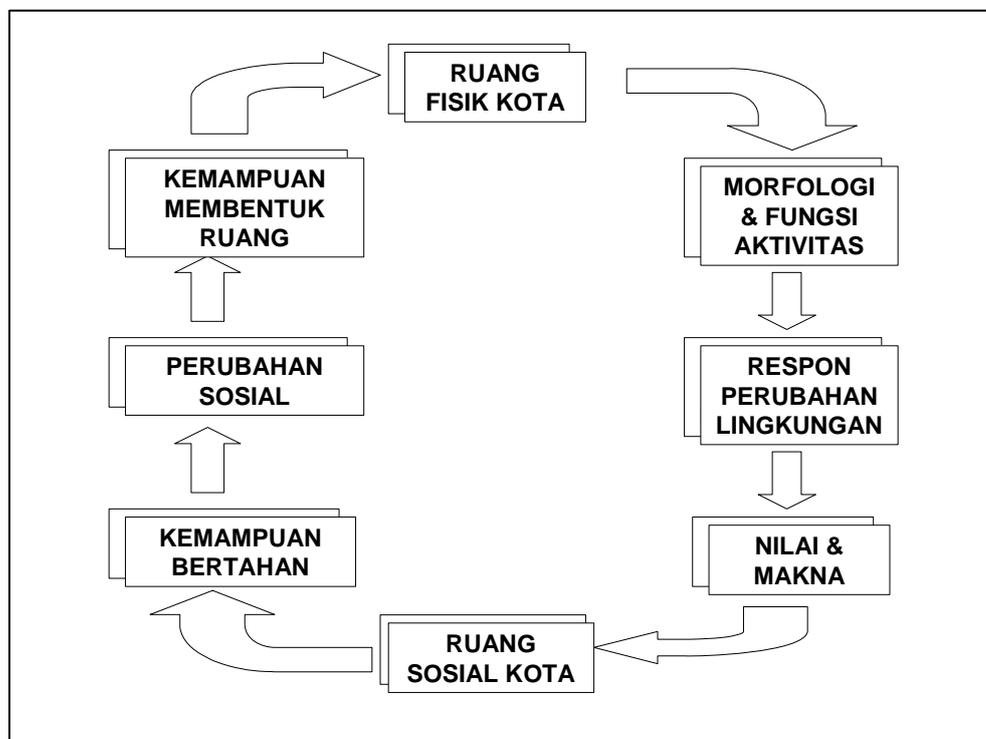
1.3.5 *Place* dalam Urbanisasi

Pembentukan *place* memiliki keterkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungannya (Doxiadis, 1968). Pemahaman *place* dalam hal ini perlu didiskusikan dalam konsep *genius loci* dan *local genius*. Konsep *genius loci* yang mengemukakan adanya jiwa atau kekuatan ruang dalam arsitektur yang mampu mempengaruhi mempengaruhi manusia untuk mempertahankannya (Norberg Schultz ,1979). Konsep *genius loci* yang mengembangkan *spirit of place* dan *power of place* memungkinkan adanya kebertahanan (membuat warga merasa betah atau terikat dengan ruangnya). Konsep *local genius* atau kearifan lokal menjelaskan strategi manusia dalam mengatasi perubahan sosial budaya memiliki kaitan dengan *genius loci* (Suroyo, 2005). Namun perlu penjelasan yang kontekstual bagaimana bagaimana *genius loci* maupun *local genius* tersebut saling mempengaruhi dan bagaimana peran komunitas menumbuhkannya ? Pada sisi lain, perlu

dijelaskan juga bagaimana hubungan antara *genius loci* dan proses urbanisasi yang membentuk ruang selama ini.

(a) *Place* dan Urbanisasi

Ruang memiliki peran penting sebagai ” wadah dan pengendali ” dalam proses urbanisasi sebagai proses transformasi kota. Ruang menjadi sumber daya, sarana untuk menjalin hubungan serta alat pertahanan mengatasi potensi dan ancaman perubahan lingkungan. Ruang menjadi modal manusia untuk mewadahi antara lain (1) Simbol (alat menyampaikan tanda) sebagai alat berkomunikasi atau penanda/lambang, (2) Wadah sebagai tempat mewadahi aktivitas (fungsi) atau menampung nilai nilai tertentu misal melanjutkan kesejarahan, (3) Wadah sebagai alat untuk melakukan ” negosiasi” atau alat tukar sebagai ruang yang dapat menjadi alat konsesus.



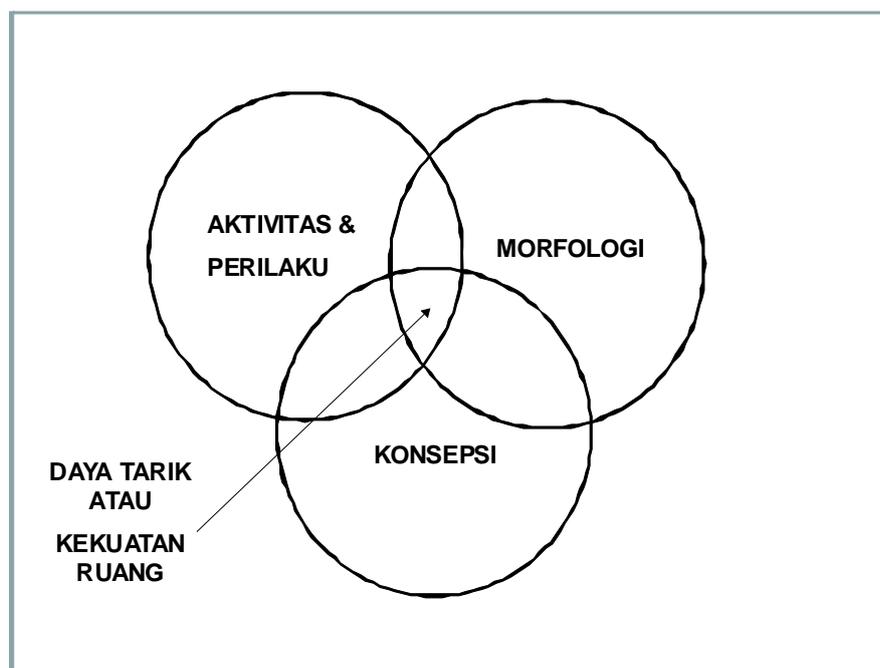
Gambar 1-02
Siklus Pembentukan Ruang Dan Kehidupan Kota
 Sumber : Diadaptasi dari Lefebre (1991) dan Mc Gee (2002)

Dari skema 1-02 di atas menunjukkan bahwa ruang dibentuk oleh hubungan timbal balik dalam suatu proses perubahan sosial. Dari perspektif sosiologi baik menurut teori ekologi sosio spasial kota maupun teori Marxis, keberadaan ruang memiliki potensi bisa mempengaruhi terjadinya konsesus maupun konflik sosial. Hal ini menjadi tantangan bagi perencana dan perancang kota pada tanggung jawab untuk melayani kepentingan sosial kota sehingga perlu merubah pandangan terbatas pada “*sense of place*” menjadi “*justice in the space*”. Bila *space* bersifat fisik dan umum maka *place* mempunyai makna kontekstual atau berkaitan dengan sosial budaya manusia sebagai pemakainya. Pandangan ini dapat dibandingkan dengan pemahaman ruang sebagai unsur kebudayaan yaitu : *mentifact* (ide atau gagasan), *socifact* (aktivitas) dan *artifact* yang berwujud fisik (Koentjaraningrat, 1984). Ruang sebagai produk budaya adalah wujud interaksi manusia dengan lingkungannya baik fisik maupun sosial budaya. Menurut Weber (Ritzer dan Goodman, 2003) ide manusia ini sangat penting dan berpengaruh pembentukan ruang sementara penganut strukturalis melihat ” lingkungan lebih penting ” atau proses pemaknaan memegang peranan penting dibandingkan dengan faktor lingkungan.

(b) Budaya, Spirit dan Kekuatan Ruang

Place bukan sesuatu yang terbentuk sendirinya namun sebagai hasil hubungan timbal balik manusia dengan ruang yang dibentuk untuk mempertahankan keberadaannya. Dalam konsep *genius loci* membuat manusia pemakainya atau yang berinteraksi untuk memeliharanya karena adanya semangat ruang (*spirit of place*), perasaan meruang (*sense of place*) atau kekuatan ruang (*power of place*). Dikaitkan dengan budaya maka kebertahanan ruang harus memahami keputusan-keputusan manusia dan faktor-faktor dalam membentuk *place*. *Local genius* yang dikemukakan para budayawan yang lebih dulu

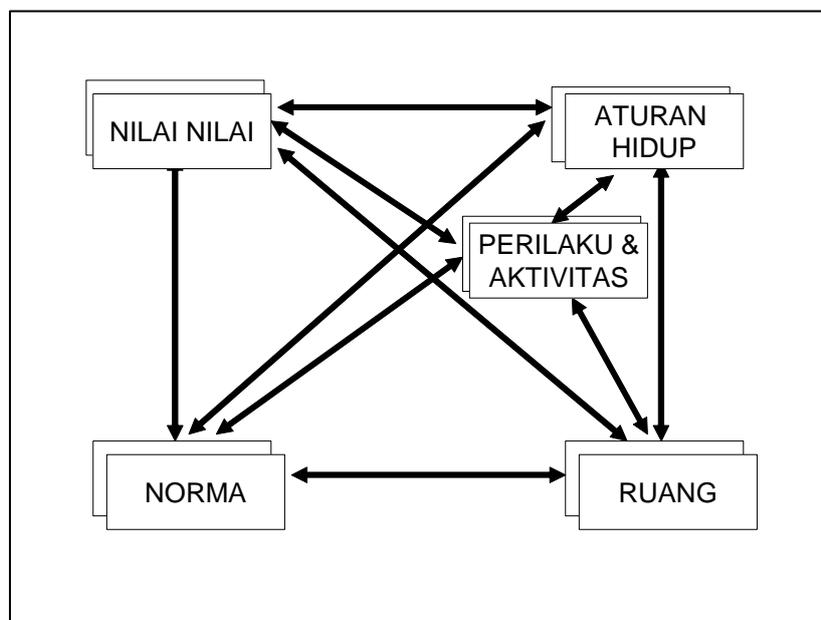
dikenal sebelum ada konsep *genius loci* adalah kemampuan budaya untuk mampu berinteraksi dan mengatasi suatu tekanan perubahan budaya. Soerjanto (1985) menjelaskan *local genius* sebagai kemampuan budaya setempat menghadapi pengaruh kebudayaan setempat (akulturasi). Hakikat *local genius* adalah (1) Mampu bertahan terhadap budaya luar, (2) Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur unsur budaya luar, (3) Memiliki kemampuan mengintegrasikan unsur unsur budaya luar ke dalam budaya asli, (4) Memiliki kemampuan mengendalikan, (5) Mampu memberikan arah pada perkembangan budaya. Istilah *local genius* diterjemahkan pula sebagai kepribadian lokal atau kearifan lokal yang mampu mendorong tindakan manusia untuk mempertahankan unsur budaya.



Gambar 1.03
Pembentukan Kekuatan *Place*
Sumber : Adaptasi dari John Lang, 1994

Baik *genius loci* dan *local genius*, keduanya memiliki persamaan yaitu adanya kekuatan budaya yang mampu mempengaruhi perilaku manusia. Perbedaannya adalah

fenomena *genius loci* berkaitan dengan wujud fisik ruang yang memiliki kandungan kesejarahan, makna relijius dan emosional dalam persepsi manusia. *Genius loci* adalah proses maupun produk budaya arsitektur. Sedangkan *local genius* berupa pengetahuan budaya yang dilestarikan oleh masyarakat. Praktek-praktek pembentukan *genius loci* diawali adanya *local genius* perlu dipahami sebagai modal bertahan dalam perubahan. Hal ini selaras dengan dengan pandangan Boerdieu (1990) terdapat kekuatan sosial (*social power*) yang terdiri dari : (1) Modal ekonomi sebagai sumber daya, (b) Modal budaya mempunyai, (c) Modal sosial, (d) Modal simbolik. Hubungan antara ruang sebagai modal dengan manusia tersebut tergambar di bawah ini :



Skema 1.04

Hubungan Timbal Balik Nilai Nilai, Norma, Perilaku & Aktivitas dan Ruang

Sumber : Abstraksi Peneliti, 2007

(c) Place : Keadilan dan Pemberdayaan

Ruang kota tidak saja merupakan wadah namun menjadi modal atau sumber daya namun sebagai arena interaksi berbagai kepentingan masyarakat. Ruang permukiman pada

kota negara sedang berkembang memiliki fungsi ganda sebagai ruang usaha dan tempat tinggal (Correa, 1985; Potter, 1985) selanjutnya guna mengembangkan ruang kota sebagai media pemberdayaan warga (Seralgeldin, 1997). Interaksi komunitas yang terikat secara keruangan pada level ketetanggaan ini memiliki kontribusi kuat dalam pengembangan kota berkelanjutan (Roseland, 2000; Carlthorpe, 2001). Bertitik tolak dari hal tersebut perlu pemahaman *place* untuk mengidentifikasi maknanya sebagai modal pemberdayaan yang produktif secara ekonomi berbasis lingkungan ketetanggaan.

Bertitik tolak dari peran sentral manusia dalam siklus produksi-reproduksi ruang yang dapat dilihat maka kajian ruang permukiman dalam konteks urbanisasi harus didasarkan suatu makna ruang guna membangun hubungan timbal balik dalam memperkuat keberadaannya memecahkan masalah-masalah sosial. Persoalan pada suatu ruang memiliki kaitan dengan *locus* maupun latar belakang sosial budayanya termasuk spirit ruangnya. Pemahaman untuk menggali makna dari fenomena ruang ini dipahami dengan baik melalui pendekatan fenomenologi dalam kehidupan sehari-hari.

1.3.6 Studi Eksistensi Kampung dalam Perkembangan Kota

Beberapa studi tentang kampung telah dilakukan dalam perspektif keilmuan yang beragam seperti planologi, lingkungan, sosiologi dan geografi secara tidak langsung membahas mengenai kedudukan kampung dalam perkembangan kota.

(a) Kampung dalam Perkembangan Kota

Kampung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur kota di Indonesia. Beragam pengertian kampung menunjukkan hubungannya yang dinamis dengan kota seperti embrio kota, permukiman sederhana yang tumbuh secara organis dan permukiman

transisional antara kota dengan desa (Cobban, 1971; Abiyasekere, 1990 ; Jellinek, 1995). Pengertian tersebut tidak hanya mengacu pada keberadaan kampung sebagai sektor informal pada bidang permukiman namun juga suatu ruang kehidupan sosial budaya masyarakat kota yang masih mempertahankan kehidupan pedesaan.

Pada masa kolonial, istilah kampung dihubungkan dengan kebijakan politik segregasi permukiman kota berdasar etnis untuk kepentingan keamanan pemerintah. Konsep tersebut dapat dilacak dalam kamus umum bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwodarminto (1952) dijelaskan bahwa kampung memiliki arti kumpulan rumah yang merupakan bagian dari kota dan kata ” mengkampungkan ” artinya menghimpun atau mengumpulkan ”. Menurut Harun dkk (1991) istilah kampung memiliki akar dari kata Portugis ” *campo* ” dan kata *kampong* baru mulai dikenal sebagai istilah resmi pada dokumen-dokumen negara pada tahun 1840-an untuk mengindikasikan penduduk asli dengan bagian kota lain yang dihuni oleh Belanda. Namun anggapan sebenarnya keliru, karena sejak abad 17 kata *kampong* telah digunakan dalam dokumen resmi untuk menyebut permukiman pribumi pendatang yang berada di luar benteng kota Batavia (Buisse, 1988). Permukiman orang-orang Belanda dan Eropa lain disebut *Bebouwde Kom* sedangkan kampung disebut *Inlandsche Gemeenten*. Istilah yang sangat stereotype ini masih bertahan sehingga kampung masih tetap dikategorikan sebagai ” tatanan permukiman yang tidak tertata dengan baik ” (Wiryomartono, 1995).

Upaya mengintegrasikan kampung dalam tatanan kota modern sudah dimulai sejak masa kolonial seperti dilakukan Thomas Karsten mempertahankan kehadiran kampung sebagai penopang kehidupan kota (Bogaers, Erica and Peter de Ruijter, 1986). Kampung dalam pemikiran liberal Karsten menjadi unsur kota yang bersifat fungsional dalam sistim kehidupan perkotaan modern. Di balik program *Kampong Verbetering* oleh pemerintah

Hindia Belanda yang bersifat intervensi, tersembunyi pengakuan bahwa kampung adalah bagian permukiman yang mendukung keberadaan kota dan kemampuan warganya mengelola kampungnya. Pada masa kemerdekaan program semacam ini dilanjutkan pada *Kampung Improvement Programme* (KIP) yang dikenal dengan nama MHT di Jakarta atau WR Supratman di Surabaya. Kritik yang dikemukakan adalah program perbaikan kampung ini pada dasarnya didasarkan pada kepentingan kota bukan untuk kampung sendiri maupun kuatnya dominasi pemerintah atau rendahnya partisipasi masyarakat (Karamoy, 1984; Harjoko, 2004). Namun kuatnya dominasi pemerintah bukan berarti menunjukkan kekuatan kampung tidak ada, berbagai kasus di Surabaya (Silas, 1996), rehabilitasi kampung Code (Khudori, 2002) atau Darrundono (2007) justru memperlihatkan adanya peran komunitas yang sangat strategis membangun lingkungan binaannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kecuali karena pengusuran atau akuisisi lahan terang-terangan, sebenarnya ada "potensi dari dalam kampung" mampu menyesuaikan diri dengan proses urbanisasi yang tengah berlangsung.

(b) Studi Terdahulu Mengenai Keberadaan Eksistensi Kampung Kota

Banyak penelitian yang mengangkat kampung secara tidak langsung sebenarnya telah membahas fenomena hubungan kampung dalam perkembangan kota.

Ada beberapa kesamaan yang dapat ditarik dari fenomena kampung sebagai kehidupan untuk meniyasati hidup di perkotaan yaitu : (a) Kehidupan yang dilandasi kebersamaan serta konsep guyub dan rukun dalam mengatasi keterbatasan menjadi bagian atau cara mereka bertahan hidup di kota besar, (b) Kekuatan lokal yang mampu tumbuh saling mengisi dalam kehidupan kota modern, (c) Kemampuan menyesuaikan yang disebabkan adanya faktor eksternal kekuatan perkembangan kota dan faktor internal kemampuan

kampung mengelola dan mempertahankan pola kehidupannya (Suparlan, 1996; Jellinek, 1995, 1999; Setiawan, 2000; Syahbana, 2003).

Tabel I.01
Penelitian Tentang Kampung Kota

No	JUDUL PENELITIAN & PENELITI	LOKASI PENELITIAN	KONTRIBUSI PENGETAHUAN
1	<i>The Kampung Jakarta, Indonesia a Study of Spatial Patterns in Urban Poverty.</i> Disertasi : Krausse, Gerald	Jakarta, 1975	Pengaruh ruang kota terhadap pola perkembangan kampung sebagai ruang permukiman.
2	<i>Local Government and Community in Java.</i> Disertasi : John,Sullivan	Yogyakarta, 1992	Modal sosial dalam organisasi komunitas formal kampung
3	Harmony and Hiraerchy in Javanese Kampung, Disertasi : Patrick Guinness	Yogyakarta, 1993	Modal sosial ” kerukunan ” dalam masyarakat Jawa yang tinggal di kampung
4	Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta Disertasi, Alison Murray,1994	Jakarta, 1994	Kesempatan memanfaatkan ruang-ruang informal kota
5	<i>Roda Berputar</i> Lea Jellinek	Jakarta, 1995	Tindakan-tindakan pragmatis masyarakat kampung
6	<i>Local Dynamic In Informal Settlement Development : A Case Study Of Yogyakarta,</i> Disertasi : Bakti Setiawan	Yogyakarta, 1998	Kemampuan masyarakat kampung memanfaatkan peluang perkembangan kota
7	Kampung Pemerdekaan, Disertasi : Darwis Khudori, 1995	Yogyakarta, 2002	Kemandirian organisasi masyarakat kampung
8	Pengelolaan Prasarana Sanitasi Lingkungan Oleh Masyarakat Di Kampung Kanalsari, Kota Semarang, Disertasi : Joesron Alie Syahbana, 2002	Semarang, 2003	Kemampuan masyarakat kampung mengatur keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial
9	Karakteristik Permukiman Dualistik Di Perkotaan Disertasi : Masykur, 2005	Bogor, 2005	Keterkaitan kehidupan kota dan kampung
10	<i>Conflicting Images of Kampung and Kota in Jakarta.</i> Antony Sihombing	Jakarta, 2005	Perkembangan kampung saling melengkapi kekurangan yang terjadi dalam proses transformasi kota modern
11	Modal Sosial dan Perbaikan Kampung Disertasi : Darrundono, 2007	Jakarta, 2007	Integrasi pola hidup paguyuban dan patembayan dalam komunitas kampung

Sumber : Analisis Peneliti, 2008

Sekalipun penelitian tersebut dapat memperkaya pandangan bahwa bertahan di kota tidak selalu didasarkan pada kepentingan ekonomi saja namun ” bahasan mengenai kebertahanan ruang ” dihubungkan dengan konsep-konsep *genius loci*, *genius local* dan sebagainya sebagai wujud kemampuan ruang mempertahankan masyarakatnya belum dilakukan. Dengan demikian studi ini sangat relevan untuk dilakukan.

1.3.7 Gap Teoritik Kebertahanan Kampung dalam Perkembangan Kota

Dalam rangka mewadahi aktivitas serta kepentingannya, manusia dengan potensi yang ada dalam diri serta lingkungannya membentuk ruang hingga kemudian sebaliknya mempengaruhi dirinya. Namun demikian peran manusia sangat besar dalam memanfaatkan atau mengubah sesuai dengan keinginannya, hal ini pula direfleksikan ruang yang diproduksinya sendiri juga memiliki pengaruh sangat kuat. Berbagai masalah yang timbul sebagai akibat ketidakterpaduan dalam perkembangan kota tidak hanya dapat dilihat dari perspektif eksternal berbagai faktor seperti ekonomi atau sosial saja melainkan dari potensi ” internal ruang ” yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Berdasar berbagai pembahasan secara kritis teori dan literatur yang ada dapat dikemukakan bahwa pengetahuan kebertahanan ruang kota merupakan pengetahuan kunci yang menjembatani integrasi ruang kota dalam proses urbanisasi dihubungkan dengan isu-isu mengenai keadilan, demokrasi, pemberdayaan dan sebagainya. Pengetahuan ini juga diharapkan dapat mengembangkan penggunaan teori ” *genius loci* dalam *place*” yang selama ini dianggap sebagai kekuatan statis dalam teori integrasi guna memecahkan konflik dalam proses urbanisasi. Adapun pendekatan menggali makna yang didasarkan pada fenomena kehidupan sehari-hari hubungan manusia dengan ruangnya juga ; tidak hanya memperhitungkan aspek yang bersifat rasional namun juga aspek subyektif untuk mengisi

berbagai pendekatan yang selama ini cenderung bersifat deterministik dan formalistik mementingkan fungsi dan mengabaikan makna ruang.

1.4 Konteks Studi Kebertahanan Kampung Kuningan

1.4.1 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Maksud penelitian adalah mendapatkan pengetahuan mengenai kebertahanan ruang permukiman dalam perkembangan kota. Adapun sebagai obyek penelitian adalah fenomena kebertahanan kampung Kuningan. Sedangkan tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu mendapatkan pengetahuan mengenai konsep-konsep kebertahanan kampung Kuningan dalam proses perkembangan kota. Manfaat yang diharapkan adalah memberi sumbangan teoritis pengetahuan mengenai karakter perkembangan kota, batas-batas kemampuan ruang, makna, nilai ruang dan peran komunitas dalam pembentukannya pada skala permukiman terhadap proses perkembangan kota.

Dari pengetahuan ini dapat dikembangkan antara lain keterpaduan dalam perancangan kota yang beragam serta pemanfaatan potensi ruang lokal maupun konservasi kota. Manfaat praktis adalah memberi masukan pada kebijakan pemerintah untuk mengelola perkembangan kota yang beragam maupun menangani keberadaan kampung sebagai bagian unsur kota modern.

1.4.2 Pertanyaan Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penelitian tersebut maka diajukan pertanyaan utama yaitu "Bagaimana kebertahanan kampung Kuningan dalam perkembangan kota ?" , Dari pertanyaan utama tersebut dapat dikembangkan pertanyaan yang lebih terinci sebagai

berikut : (1) Bagaimana fenomena kebertahanan kampung dihubungkan dengan perkembangan kota ? Bagaimana fenomena tersebut terbentuk ?, (2) Bagaimana kebertahanan kampung serta kontribusi ruang dalam mempertahankan keberadaan kehidupan kampung tersebut ? (3) Pengetahuan teoritis apa yang dapat dikontribusikan dari pengetahuan kebertahanan kampung pada konsep integrasi ruang kota ?

1.5 Penelitian Dalam Paradigma Naturalistik

Proses penelitian memerlukan paradigma⁴ sebagai kerangka filosofis pengetahuan yang melandasi pemahaman dari perspektif tertentu berdasarkan tujuan penelitian dan karakteristik obyeknya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali pengetahuan dari fenomena kebertahanan kampung Kuningan yang bertahan dalam perkembangan kota yang dapat digali dari kehidupan sehari-hari. Berdasarkan karakter obyek maka penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai studi kasus (Yin, 2004). Kondisi ini memerlukan penggalian secara mendalam untuk mencari pengetahuan kebertahanannya serta memiliki kaitan dengan lokalitasnya. Suatu pendekatan yang tepat adalah dengan cara melihat ruang atau lingkungan terbangun tersebut dari dalam mereka sendiri sehingga peneliti harus terjun ke dalamnya untuk melihat aspek keruangan yang bersifat *manifest* maupun *latency* secara nyata. Hal ini mengharuskan penelitian secara holistik dan mendalam atas kasus maupun sumber informasi yang bersifat terbatas tersebut.

Penelitian naturalistik memang tidak dimaksudkan untuk membangun pengetahuan secara nomotetik yang menghasilkan teori general tetapi hasil penelitian merupakan

⁴ Paradigma diartikan sebagai kumpulan mengenai asumsi yang secara logis dianut bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian (Bogdan dan Biklen, 1982 dalam Moleong, 2000). Parwoto (1985 dalam Khudori, 2000) mengemukakan bahwa paradigma adalah pola dasar berpikir sebagai titik tolak untuk memiliki, merumuskan dan mengembangkan teori sebagai landasan definisi dan tindakan. Paradigma paradigma tersebut sangat berpengaruh dalam memahami suatu masalah teoritis karena bertitik tolak dari pandangan yang berbeda.

pengetahuan substantif yang terikat pada lokasi tertentu. Paradigma yang tepat digunakan dalam penelitian yang didasarkan pada kasus, pendekatan holistik, natural dalam upaya membangun teori substantif adalah naturalistik (Muhadjir, 2000; Moleong, 2000; Groat, 2002; Sudradjat, 2007). Perbedaan paradigma naturalistik dengan positivistik dapat dilihat pada tabel 1.02.

Tabel 1.02
PARADIGMA POSITIVISTIK DAN NATURALISTIK

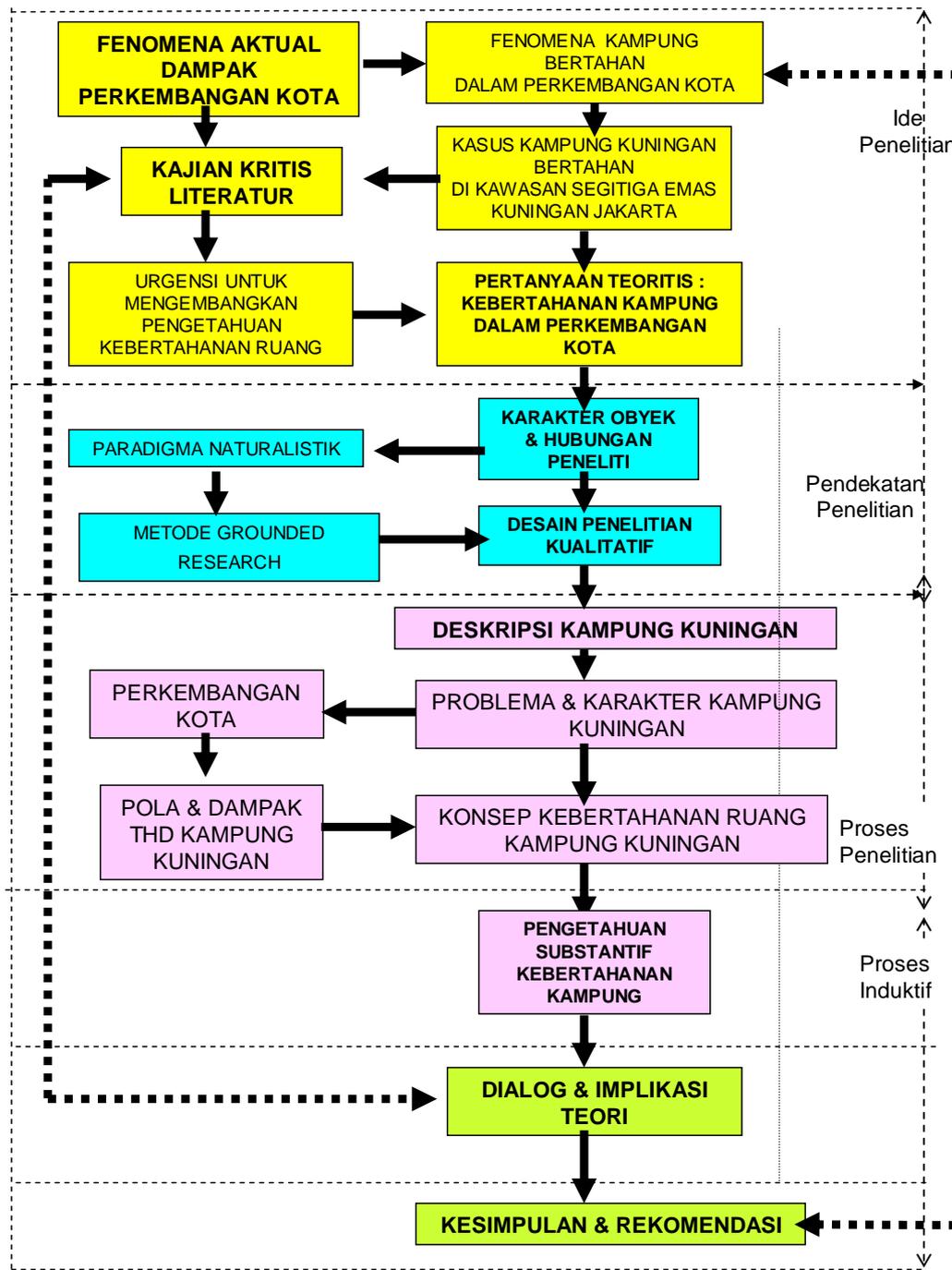
PARAMETER	POSITIVISTIK	NATURALISTIK
Kedudukan Terhadap Teori		
1. Kedudukan Terhadap Teori	Pembuktian/Deduktif Teori sebagai dasar untuk dibuktikan	Pencarian teori /Induktif Teori sebagai <i>background knowledge</i> atau titik tolak gap teori
2. Penggunaan Hipotesis	Hipotesis/Grand Theory	Tanpa Hipotesis
Data		
1. Karakter Data	<i>Tangible</i>	<i>Tangible</i> dan <i>Intangible</i>
2. Fenomena	Terkendali/parsial	Alamiah/Tidak terkendali
3. Kaitan Peneliti dan Obyek Penelitian	Terpisah	Terkait-Tidak Terpisahkan
4. Konteks Data	Tidak Unik	Unik
5. Sampel	Acak	Purposive
6. Realitas	Tunggal	Ganda
7. Ukuran Data	Tergantung Jumlah/ukuran	Tidak Tergantung Jumlah/ukuran
8. Pendekatan	Parsial	Holistik
Pengukuran		
1. Pendekatan Hasil	Etik (berasal dari penelitian)	Emik (berasal dari Obyek penelitian)
2. Ukuran Kebenaran	Obyektif	Subyektif
3. Aksiologis	Bebas Nilai	Tidak Bebas Nilai
		Kredibilitas, Transferebilitas
4. Kesimpulan	Generalisasi/Nomotetik	Relatif/Berlaku Khusus/Ideografis
5. Kebenaran	Logik dan sensual	Logik, sensual, etik dan transedental

Sumber : Muhadjir (2000), Endraswara (2003), Sudaryono (2004)

Pemilihan paradigma naturalistik pada penelitian ini berangkat dari beberapa asumsi sebagai berikut : Pertama, penelitian berangkat dari upaya mendapatkan pengetahuan berdasar fenomena lapangan dalam kondisi sewajarnya atau alamiah bukan atas dasar teori-teori yang ada. Hasil bukan merupakan tujuan namun proses dianggap lebih penting. Kedua, obyek penelitian dalam hal ini bukan saja merupakan fenomena fisik berupa artifak namun juga gejala sosial yang seluruhnya tidak dapat ditangkap dengan panca indera

karena tersembunyi dalam berbagai fenomena. Ketiga, penelitian ini menekankan pada unit amatan yang terbatas dengan prinsip “ *thick and depth* “ (Geertz, 1973). Keempat, fenomena bertahan sebagai gejala sosio-spasial yang nampak maupun tersembunyi. Aspek yang tersembunyi hanya dapat dipahami melalui pendekatan *verstehen* sehingga kebenaran didapatkan seolah-olah hal tersebut dialami sendiri oleh peneliti dengan memasuki dunia keseharian yang alamiah dan wajar.

Ada pandangan yang meragukan kebenaran dalam penelitian ini karena peneliti terperangkap pada subyektifitas. Keberatan terhadap subyektifitas penelitian semacam ini sering dilontarkan para penganut positivistik namun paradigma ini memiliki tolok ukur tersendiri yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan yang memfokuskan pada obyek terbatas telah lazim dilakukan para peneliti sosial seperti Geertz (1950), Jellinek (1995) dan Hefner (2000) atau perencana kota seperti Syahbana (2002). Penelitian naturalistik justru dapat mengisi kekurangan penelitian positivistik. Pengetahuan dalam teori arsitektur meliputi dua aspek perlu menjembatani dunia ide dengan dunia kenyataan sebagai panduan praktis. Pengetahuan tersebut mencakup pengetahuan deskriptif yang bersifat menerangkan dan preskriptif yang bersifat panduan. Dalam rangka menjembatani kedua pengetahuan tersebut pada akhir penelitian dilakukan dialog dalam rangka membangun pengkayaan teori. Skema 1.05 menjelaskan bagaimana dari ide hingga temuan distrukturkan sebagai bangunan teori. Penelitian arsitektur ini menghasilkan pengetahuan substantif yang terikat dengan konteks waktu dan lokalitasnya.



Gambar 1.05

Skema Proses Dan Pentahapan Penelitian

Sumber : Konstruksi Peneliti, 2006-2007

1.6 Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Keseluruhannya terdiri dari 8 (delapan) bab yang menjadi rangkaian pembahasan secara berturut turut sebagai berikut :

Bab I, bagian pendahuluan mengemukakan ide penelitian tentang krisis integrasi kota di Indonesia dalam proses urbanisasi serta ketertarikan mengambil obyek studi keberterahanan kampung. Dalam bagian ini dibahas mengenai kajian kritis konsep-konsep berkaitan dengan keberterahanan yang diperdebatkan dalam penelitian ini. Dari kajian kritis literatur dikemukakan gap pengetahuan teoritik keberterahanan kota dalam menghadapi perkembangan kota. Berdasarkan kedudukan terhadap teori, karakter data dan tujuannya maka penelitian menggunakan paradigma naturalistik.

Bab II, menguraikan strategi dan teknik penelitian mengacu pada metode naturalistik untuk menganalisis perubahan serta keberterahanan kampung serta faktor faktor pendukungnya. Pertama, membahas mengenai prinsip prinsip mengenai data dan informasi. Kedua, membahas mengenai teknik teknik pengumpulan dan analisis data serta penyusunan teori. Ketiga menguraikan mengenai tahap-tahap pelaksanaan penelitian dan hasil yang dikemukakan.

Bab III, mengemukakan ruang dan kehidupan kampung Kuningan serta masalah yang dihadapi yang menyangkut berbagai hal antara menyangkut sejarah, mitos, potensi lokasi dan kondisi sosial ekonomi sehari-hari. Dari pembahasan ini dapat diketahui bahwa keberlangsungan kehidupan kampung berkaitan dengan keberadaan ruang dan aktivitas warganya maupun kawasan yang berada di luar kampung tersebut.

Bab IV, membahas perkembangan kota dan kawasan Kuningan hingga sekarang ini serta dampak keruangannya terhadap kampung. Dari bahasan ini diketahui bahwa terdapat

dua pola perkembangan yaitu perkembangan yang mengikuti proses perkembangan kota dan perkembangan yang mempertahankan kehidupan kampung. Kedua pola perkembangan berbeda tersebut tidak selalu menunjukkan konflik namun juga saling melengkapi satu dengan yang lain.

Bab V, membahas 3 (tiga) unit amatan ruang kampung yang merupakan wujud keberadaan ruang dan kehidupan kampung yaitu ruang hunian, ruang bersama dan ruang religius. Dari bahasan ini ditemukan adanya pola-pola dan konsep-konsep dasar pengetahuan keberlanjutan ruang kampung.

Bab VI, bab ini menguraikan dan menstrukturkan pengetahuan teoritis keberlanjutan kampung Kuningan yang dapat dikategorikan sebagai pengetahuan substantif. Ada 3 (tiga) temuan pengetahuan yaitu : (1) Pengetahuan keberlanjutan ruang kampung, (2) Penyesuaian kampung terhadap keberadaan kawasan modern, (3) Pelestarian kampung yang dilakukan oleh warganya maupun pelaku aktivitas lain di kawasan tersebut. Pengetahuan tersebut dapat disintesis sebagai pengetahuan integrasi kampung dengan kota.

Bab VII, mengemukakan diskusi pengetahuan substantif dengan teor-temuan pengetahuan keberlanjutan kampung dalam berbagai teori-teori perkotaan dalam rangka memberikan pengkayaan pengetahuan arsitektur kota maupun untuk membangun teori integrasi ruang kota.

Bab VIII, sebagai bagian akhir disertasi menguraikan kesimpulan, kontribusi teori dan saran penelitian. Pengetahuan keberlanjutan kampung memiliki kontribusi terhadap teori keberadaan kampung, konsep integrasi kota dan konservasi kampung. Saran yang diajukan adalah perubahan rancangan kawasan Mega Kuningan dengan mengembangkan konservasi kampung.